

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn, maka ditemukan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Pada dasarnya kesimpulan adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Terkait dengan penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kinerja DPRD kota tidore kepulauan dalam menjalankan fungsi legislasi belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan belum adanya PERDA yang dihasilkan oleh DPRD tidore kepulauan pada periode 2014-2019. Kalau pun ada, maka itu masih dalam tahap rancangan berdasarakan kinerja dari DPRD sebelumnya. Sampai dengan saat ini, sudah ada beberapa rancangan PERDA (RAPERDA) yang menjadi fokus kinerja dari DPRD tidore kepulauan. Seharusnya sekarang ini sudah memasuki tahap implementasi PERDA tersebut, bukan lagi pada tahap pembahasan rancanganya. Ini merupakan salah satu indikator bahwa secara kelembagaan, DPRD tidore kepulauan belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oelh DPRD tidore kepulauan hingga belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kendala-kendlaa tersebut adalah *pertama* adanya sistem oligarki kepemiminan dipihak ketua DPRD. Semua keputusan yang diambil ditentukan secara akhir pada pimpinan DPRD. Hal ini

menjadi sulit apabila kepentingan dari pimpinan DPRD dan partainya dengan sejalan dengan PERDA yang akan dihasilkan. Sehingga terkadang proses pembuatan peraturan daerah macet pada proses pengesahn yang telah melibatkan pimpinan-pimpinan di DPRD kota tidore kepulauan. *Kedua* adanya pertimabngan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Artinya bahwa peraturan daerah yang dihasilkan akan mempertimbangkan keuntngan secara poltisi dari kedua lembaga tersebut. Jika kepentingan tidak satu, maka tentu akan sulit dalam proses pembuatan peraturan-peraturan daerah. Realiata ini sering terjadi di DPRD kota tidore kepulauan. *Ketiga*,Kendala yang diahadapi adalah kualitas SDM dari setiap legislator yang ada di DPRD kota tidore kepulauan. Sangat sedikit anggota legilatpr yangng memilik latar belakang poltik ataupun hukum.hal ini menyulitkan proses pembuatan peraturan daerah karena sebgaiian besar anggota DPRD kota tidore kepulauan belum paham proses pembuatan peraturan daerah. Sangat dipahami mengingat mereka bukan dari latar belakang pendidikan politk, pemernathan, aaupun hukum. Bahkan ada sebgaiian dari meerka yang baru mengenal dan pertamakali ikut dalam pembuatan regulaasi. Sangat ironis sekali ketiak seorang tidak paham dengan mengerti apa yang harus dikerjakanya sebagai kewajiban. *Keempat*, kendala yang diahapi selanjutnya adalah adanya kecenderungan legislators kota tidore kepulauan sebagai wakil partai, bukan wakil rakyat. Sehingga dalam menjalankan tugas tertentu fungsi legislasi, pertimbangan yang digunakan adalah kepentingan partai politik sebagai kenderaanya menuju legislator, bukanlah kepentingan rakyat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis melahirkan sebuah saran dan pedapat dikatakan juga sebagai rekomdasi terkait optimalisasi kinerja DPRD kota tidore kepulauan keberbagai pihak yang terkait. Rekomdasi tersebut diarahkan kepada pihak-pihak yaitu :

1. Pihak DPRD kota tidore kepulauan harus selalu memegang teguh dan menyadari fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas diatas kepentingan lainnya.
2. Pihak pemerintah daerah harus lebih produktif lagi dalam memberikan usulan rancangan peraturan daerah sehingga bisa menjadi mesin pemicu produktifitas regulasi didaerah.
3. Rakyat : harus aktif dan selalu berpartisipasi dalam proses politik terutama menyangkut pembuatan regulasi dikota tidore kepulauan. Hal ini diperluakn guna menagwal kinerja DPRD kota tiudre kepulauan secara kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. Rucky, 2001 ; *sistem manajemen kinerja, Performance management system*, Panduan Praktis untuk merancang Kinerja Prima, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Alfian, 1990, *masalah pelaksanaan fungsi DPR yang diinginkan oleh Uud 1945*, dalam Jurnal Ilmu Politik, Nomor 7, AIPI, LIPI, dan PT. Gramedia, Jakarta.
- Anonim, 2004. *Laporan Kepala LAN-RI pada Rapat Koordinasi PAN Tingkat Nasional 2004 di Makassar*
- Bernardin, H John dan Russel AA 1993, *human resource managemen, experimental Approach*, Mc Goww-Hill International Edition, Mc Graww-Hill Book Co. Singapore
- Blau, M. Peter dan Marshall W.Meyer. 2000. *Birokrasi dalam masyarakat modern*, Prestasi Pustakaeya , Jakarta.
- Deep, Sam dan Lyle Sussman, 1996; *mengfektifkan kinerja, saran untuk Menghadapi 44 Jenis orang yang Menimbulkan Masalah di Libgkungan Kerja* , Penerbit PT. Pusataka binaman Presindo Jakarta.
- Depdagri, 2001. *Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Penataan Kewenangan, Kelembagaan dan Personil*, DDn dan otoda, Jakarta.
- Dwiyanto, 1995. *A. Comparative researck project on rural public service and local level civil service reforms, centre for population and policy studies*, UGM
- Moleong, Lexy J.2014. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja
- Inu Kencana Syafie. 2014. *Proses legislasi*, Bandung : Refika Aditama
- Iza, R. 2012. *model ideal kapasitas masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya. (Edivi revisi)
- Sujarto, Joko. 1993. *Kinerja dan tata ruang dalam pembangunan kota*. Disertasi, ITB, Bandung.
- Sulistyowati, Irianto dkk. 2012. *Kajian sosio legal*. Jakart. Pustaka Larasan
- Syafie, Kencana (2014:55-56) *Proses Legilatif*. Bandung, PT. Rafika Aditama

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Tjibto, Fandy, 2000; *prinsip-prinsip Quality service (TQS)* Penerbit Andi, Ceatakan Peratama Yogyakarta.

Bambang Setyadi, M.Si dalam Diskusi Panel Kajian Terhadap Kebijakan-Kebijakan Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Indonesia tanggal 29 Maret2007

A. Internet

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/faktor-faktor-peningkatan-kinerjadpr.html>

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-tugas-fungsi-hak-dpr.html>

<file:///G:/New%20Folder/Pengertian%20dan%20Proses%20Penyusunan%20Peraturan%20Daerah.htm>